

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penduduk di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar, penambahan penduduk yang terus meningkat dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 239.400.901 jiwa dan pada tahun 2015 berjumlah 274.964.408 jiwa (BPS, 2015). Jumlah penambahan penduduk dari periode 2010-2015 adalah 35.563.507. Hal ini berarti penambahan penduduk rata-rata 7.112.701 per tahun, dan penyebarannya tergolong tidak rata, dimana penduduk di perkotaan lebih padat dibandingkan dengan penduduk di pedesaan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diatur serta dibatasi, akan berdampak negatif terhadap bidang kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan pembangunan nasional. Permasalahan kependudukan yang dihadapi Indonesia melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Upaya pemerintah untuk mengatasi ledakan penduduk ini, yaitu dengan suatu program yang dikenal dengan istilah Gerakan Keluarga Berencana. Untuk menjalankan tugas ini pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencanaan Nasional (BKKBN).

Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dimulai sejak 23 Desember 1957 yang pada masa itu disebut dengan Program Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), setelah itu diubah menjadi Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang dibentuk pada tanggal 17 oktober 1968. Kegiatan keluarga berencana telah ditingkatkan menjadi suatu gerakan nasional. Sesuai dengan perkembangan pelaksanaannya dibutuhkan penyempurnaan

organisasi sehingga pada 29 Juni 1970 diubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan sesuai dengan UU No 52 tahun 2009 diubah lagi menjadi Gerakan Keluarga Nasional.

Tujuan Gerakan Keluarga Berencana ini adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebangan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan motto “ Dua anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja”. Walaupun telah dilaksanakan gerakan KB namun pada kenyatannya belum sesuai dengan yang diharapkan (Aputra, 2004).

Gerakan keluarga berencana merupakan usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Untuk mengatasi permasalahan laju penduduk ini maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan program keluarga berencana (KB). Sasaran program KB adalah pasangan usia subur yaitu suami dan isteri. Sekarang ini program gerakan keluarga berencana nasional mempunyai paradigma baru dengan visi yang diubah menjadi keluarga berkualitas tahun 2015. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pinem, 2009). KB dapat dilaksanakan jika pasangan usia subur mau berpartisipasi dalam menggunakan alat kontrasepsi sebagai upaya untuk mewujudkan program keluarga berencana.

Ketidak berhasilan keluarga berencana dipengaruhi beberapa faktor yakni, umur pasangan usia subur (15- 49 tahun), pendidikan (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), pekerjaan (pertanian dan non pertanian), budaya (faktor keturunan, banyak anak banyak

rejek, anak sebagai faktor ekonomi, kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan interpersonal, mekanisme pelayanan ketetapan konstelasi pelayanan akseptor KB, dan strategi penerapan pelaksanaan gerakan keluarga berencana. (BKKBN, 2016)

Keadaan penduduk ini di Sumatera Utara juga mengalami penambahan penduduk, pada tahun 2010 jumlahnya 12.982.204 jiwa, dan pada tahun 2015 berjumlah 13.766.851 jiwa (BPS Sumut, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan penduduk selama periode 2010-2015 adalah 784.647 atau 156.929 jiwa per tahun. Keadaan ini juga berlaku di setiap kabupaten diantaranya Kabupaten Tobasa, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Simalungun, Batubara, dan Tapanuli Utara. Di Kabupaten Tapanuli Utara jumlah penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 290.864 jiwa diantaranya Pasangan Usia Subur (PUS) berjumlah 58.716 KK, yang terdiri dari 32.796 KK yang aktif KB dan yang tidak aktif KB 25.920 KK (BKKBN, 2015). Kondisi demikian juga terjadi di berbagai Kecamatan diantaranya di Kecamatan Pangaribuan, Garoga, Tarutung, Siborong-borong, Parmonangan, Pahae Jae, Siatas Barita dan Sipahutar.

Desa Onan Runggu III salah satu desa di Kecamatan Sipahutar. Gerakan Keluarga Berencana sudah ada sejak tahun 1970 hingga berlangsung sampai sekarang. Jumlah penduduk Desa Onan Runggu III pada tahun 2015 adalah 2.515 jiwa atau 527 KK. Dari jumlah KK yang ada terdapat 412 pasangan usia subur (PUS) dengan perincian yakni peserta KB aktif 332 pasangan usia subur dan yang tidak aktif KB 80 pasangan usia subur, serta banyak usia PUS yang memiliki anak lebih dari dua orang (PPKBD, 2015). Hal ini berkaitan dengan faktor agama, umur, pendidikan, pekerjaan, kebudayaan, dan kualitas pelayanan akseptor KB. Sehubungan dengan ini perlu dianalisis Gerakan Keluarga Berencana di Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka identifikasi masalah pada gerakan keluarga berencana meliputi faktor agama, umur, pendidikan, pekerjaan, kebudayaan, dan kualitas pelayanan apsektor (memberi informasi) di Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka masalahnya dibatasi pada gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III mencakup faktor agama, umur, pendidikan, pekerjaan, kebudayaan, dan kualitas pelayanan apsektor.

D. Perumusan masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka masalahnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor umur?
2. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor pendidikan?
3. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor pekerjaan?
4. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor kebudayaan?
5. Bagaimana keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor kualitas pelayanan akseptor KB?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor umur?
2. Untuk mengetahui keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor pendidikan?
3. Untuk mengetahui keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor pekerjaan?
4. Untuk mengetahui keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor kebudayaan?
5. Untuk mengetahui keadaan gerakan keluarga berencana di Desa Onan Runggu III di tinjau dari faktor kualitas pelayanan akseptor KB?

F. Manfaat Penelitian

Setelah peneliti selesai melakukan penelitian diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya melalui Dinas Kependudukan dan khususnya Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk melalui Gerakan Keluarga Berencana.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Onan Runggu III pentingnya pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana.
3. Menambah wawasan bagi penulis untuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

4. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti dalam penelitian yang sama pada objek yang berbeda.



THE
Character Building
UNIVERSITY